

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA DESA GUNUNG BATU KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

Mariana¹, Agus Surya Dharma², Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.(STIA) Amuntai

Email : nananh22g@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 10 orang informan digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan masih kurang baik menurut variabel dan indikator berikut: *Pertama*, Perencanaan Keuangan, penentuan tujuan sudah baik dengan pembuatan RPJMDes. Perencanaan kegiatan belum baik. *Kedua*, Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan cukup baik. Program yang telah terealisasi belum baik. *Ketiga*, Pengawasan indikator Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran cukup baik, Pengawasan terhadap penyusunan anggaran belum baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan /proyek belum baik. *Keempat*, Pertanggungjawaban Penyusunan laporan belum baik, Penyampaian pelaksanaan program Desa Gunung Batu sudah baik, Faktor Penghambat antara lain : Kurangnya Partisipasi Masyarakat, dan belum optimalnya peran BPD, dan Penyusunan RAB masih bergantung pada Pendamping Desa, kedua Faktor Pendukung antara: pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran dan dilaksanakannya penyampaian pelaksanaan program. disarankan kepada Kepala Desa agar membentuk BUMDes dan mengikut sertakan masyarakat pada rapat perencanaan kegiatan, Aparat Desa meningkatkan kapasitas dan keahlian dan BPD agar lebih optimal mengawasi penggunaan dana desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi, Dana Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to manage Village Fund Allocation (ADD) in Gunung Batu Village, Tebing Tinggi District, Balangan Region and the influencing factors. This study uses a descriptive-qualitative approach. Interviews, observation and documentation were used as data collection techniques, 10 informants. Collected data were analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusions. Based on the results of the study, the management of Village Fund Allocation (ADD) in Gunung Batu Village, Tebing Tinggi District, Balangan Regency is not good according to the following variables and indicators: First, Financial Planning, Determining the goals is good by making the RPJMDes. Activity planning is not good. Second, implementation, the implementation of activities is quite good. The program that has been realized is not good. Third, monitoring indicators. Supervision of budget utilization is quite good. Supervision of budget preparation is not good. Supervision of the implementation of activities/projects is not yet good. Fourth, Accountability for preparing reports is not good, Delivery of the implementation of the Gunung Batu Village program is good, Inhibiting factors include: the role of the BPD is not yet optimal, and Preparation of the RAB still depends on the Village Facilitator, second Supporting factors include: supervision of budget utilization and delivery of program implementation. It is recommended to the Village Head to form BUMDes and involve the community in activity planning meetings, Village Officials increase capacity and expertise and BPD to more optimally supervise the use of village funds.

Keywords: Management, Allocation, Village Funds

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan negara, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintahan desa merupakan cabang terkecil pemerintahan Republik Indonesia. Namun

pemerintah desa mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan dapat berjalan optimal di setiap desa, maka tujuan lembaga negara untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan akan terwujud.

Pengelolaan perekonomian daerah adalah segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengendalian perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud dengan pengelolaan perekonomian daerah meliputi pengelolaan kas daerah secara umum, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, dan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan teknis yang bertanggung jawab dalam menerima pendapatan daerah dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan daerah melalui kas umum daerah. Dengan adanya kas daerah maka suatu daerah dapat mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran- pengeluantn daerah. Di dalam kas umum daerah juga dapat diketahui berapakah kekayaan yang dimiliki suatu daerah.

Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam permendagri nomor 13 tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan.

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem pemerintahan suatu negara khususnya negara Indonesia dan dalam menjalankan pemerintahan di suatu desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana untuk mendukung segala kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 72 UU No. 6 TAHUN 2014. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 pengertian Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahunnya sejak tahun 2021 khususnya, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar dan dana tersebut meningkat setiap tahunnya. Untuk total jumlah Anggaran dana desa di Desa Gunung Batu dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2014

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi
1	2021	1.187.592.000,00	1.187.649.000,00
2	2022	1.526.854.000,00	1.526.060.482,67

3	2023	1.922.774.000,00	1.922.487.813,00
4	2024	2.813.842.000,00	-

Sumber : Alokasi Dana Desa Gunung Batu Tahun Anggaran 2021-2024

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Gunung Batu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023, sebagaimana perubahan terakhir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gunung Batu Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 1.922.774.000,00 terdiri dari:

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gunung Batu Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah
1. Pendapatan desa	Rp. 1.922.774.000,00
2. Belanja desa	Rp. 1.987.382.977,00
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 980.648.327,15
b) Bidang Pembangunan	
c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 449.139.650,00
d) Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 192.195.000,00
e) Bidang Tak terduga	Rp. 232.200.000,00
	Rp. 133.200.000,00
Surplus/Defisit	Rp. (64.608.977,15)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 64.608.977,15
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gunung Batu Tahun Anggaran 2023

Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDesa Tahun 2023, sekaligus dilampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) dan rincian inventaris aset Desa serta Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Keberhasilan yang Dicapai Selama tahun 2023 Pemerintah Desa Gunung Batu dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa cukup berhasil, dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan termasuk program sektoral yang masuk ke Desa, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah desa meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1) Tersedianya Mobil Operasional Desa;
 - 2) Laporan pertanggungjawaban APBDes 2023 selesai tepat waktu;

- 3) Musyawarah Desa dilaksanakan secara berkala minimal setiap 3 bulan;
 - 4) Terlaksananya Kegiatan Pemilihan BPD;
 - 5) Dukungan Expo Tingkat Kecamatan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 1) Pelaksanaan posyandu dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan agar balita maupun Usila mendapat pelayanan tanpa rasa was-was selama masa pandemi;
 - 2) Berkurangnya anak gizi buruk melalui kegiatan Posyandu reguler dan Posyandu jemput bola;
 - 3) Tidak ada kasus ibu hamil dan melahirkan meninggal di Desa melalui program pemeriksaan dan edukasi kesehatan kehamilan bagi ibu hamil;
 - 4) Pemeliharaan & Pembangunan Jalan Usaha Tani;
 - 5) Terpeliharanya Sarana Mobil Ambulance Desa;
 - 6) Pembuatan dan pengelolaan informasi berupa baliho dan layanan Internet untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi keuangan desa dan kegiatan lainnya yang menggunakan Internet;
 - 7) Meningkatnya Aula Kegiatan Posyandu;
 - 8) Tersedianya tempat bermain anak untuk kegiatan Posyandu Balita;
 - 9) Tersedianya Penerangan Jalan Tenaga Surya;
 - 10) Posyandu Rutin Tiap Bulan;
 - 11) Meningkatnya Kapasitas Kader Posyandu.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 1) Aktifnya Karang Taruna melalui kegiatan-kegiatan positif seperti Kegiatan Pengelolaan Lapangan Sepak Bola dan kegiatan bakti sosial;
 - 2) Dan Pengadaan Perlengkapan Olahraga Pendukung Kegiatan Olahraga Karang Taruna;
 - 3) Aktifnya PKK melalui kegiatan-kegiatan pelatihan bagi anggota PKK untuk meningkatkan keterampilan;
 - 4) Melakukan Studi Banding Bagi Anggota PKK;
 - 5) Terciptanya keamanan dan ketertiban di Desa melalui kegiatan jaga malam.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 1) Meningkatnya kapasitas aparatur Desa melalui Bimtek /Workshop /Pelatihan;
 - 2) Dilaksanakannya Kegiatan Ketahanan Pangan berskala Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Batu;
 - 3) Terlaksananya Kegiatan Ketahanan Pangan berupa kolam ikan Bioflok.
- e. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
- 1) Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tantangan Pemerintah desa yakni harus mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki lingkup permasalahan yang lebih luas. Sehingga desa sebagai organisasi pemerintahan yang terendah harus diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, mulai dari tahapan perencanaan sampai tahap pengawasan dengan melibatkan stakeholders ditingkat desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan organisasi masyarakat lainnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam pembangunan desa adalah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan pada Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, terdapat beberapa masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu :

- a) Dalam hal Perencanaan Keuangan, Penyusunan RAB masih bergantung pada Pendamping Desa, karena Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola ADD, yakni aparat yang terkait dalam perencanaan keuangan itu dilihat dari Penyusunan Rancangan anggaran Biaya (RAB) fisik masih bergantung pada konsultan atau pendamping Desa .
- b) Dalam hal pelaksanaan masih Kurangnya Partisipasi Masyarakat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa, peran yang belum maksimal menyebabkan masyarakat kurang mengetahui rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan.
- c) Dalam hal Pengawasan masih Belum optimalnya peran BPD dalam Pengawasan, Sebagian dari masalah dalam pengelolaan desa yang lainnya adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa, atas nama pemerintah maupun lembaga desa. Pengawasan yang tidak memadai dapat menimbulkan potensi penyelewengan maupun penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. pengawasan dari BPD dan masyarakat masih kurang dari dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho dalam Mahendra (2023:115) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu Mahendra (2023:115) menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Sementara Terry dalam Mahendra (2023:116) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan Pengelolaan Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu,

tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin Mahendra (2023:115) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadaan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai

Pengelolaan Keuangan

Menurut Purba (2021:2-4) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Mardiasmo dalam Khasanah dan Ichwan (2022:35) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1) Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2) Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *Value For Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki dayaguna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Menurut Sahya Anggara (2016:262) Ruang lingkup pengelolaan keuangan negara meliputi hal-hal berikut :

a. Perencanaan keuangan negara;

Perencanaan merupakan sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan berjalan dengan lancar.

b. Pelaksanaan keuangan negara;

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

c. Pengawasan keuangan negara;

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan menjamin semua kebijakan sesuai dengan aturan berlaku sehingga dapat mengetahui apakah perencanaan berjalan secara efektif.

d. Pertanggungjawaban keuangan negara.

Merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalam administrasi publik pemerintahan dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja. Serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi.

Fungsi Administrasi Keuangan

Seorang administrator keuangan dalam sebuah organisasi melakukan tugas akuntansi serta penganggaran. Administrator keuangan harus memiliki gelar sarjana di bidang akuntansi atau administrasi bisnis dengan fokus di bidang keuangan. Berikut ini fungsi administrasi keuangan perusahaan perusahaan adalah :

a. Pembayaran dan Penagihan

Tugas *staff* administrasi keuangan membayar tagihan untuk korporasi. Fungsi administrasi keuangan, misalnya melakukan prosedur perjanjian pembelian dengan faktor vendor dan menerima laporan untuk memastikan pembayaran yang dikirim untuk pembelian resmi oleh perusahaan hingga diterima. Administrator Keuangan mempunyai rekening penjual dan memastikan keakuratan faktor pada semua bahan yang diterima.

- b. Entri Jurnal Seorang administrator keuangan melakukan tugas akuntansi seperti membuat jurnal secara teratur.

Jurnal entri dalam prinsip dasar akuntansi adalah catatan kronologis semua transaksi untuk sebuah perusahaan. Entri dibuat menjadi buku besar akuntansi, yang dibuat oleh akun.

- c. Akun Rekonsiliasi dan Penutupan.

Administrator Keuangan berpartisipasi dalam kegiatan penutupan organisasi. Penutupan adalah proses akuntansi yang dapat mencakup rekonsiliasi perbedaan persediaan, depresiasi aset tetap perusahaan dan posting informasi penagihan. Administrator juga berpartisipasi dalam kegiatan penggajian untuk korporasi. Menutup akun rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan atau tahun di kebanyakan organisasi.

- d. Penganggaran.

Sebuah perusahaan menganalisa informasi keuangan yang digunakan untuk membuat anggaran bulanan oleh staff administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan juga, memantau anggaran dan melakukan analisis biaya dan peramalan keuangan. Karyawan di posisi administrator keuangan juga mempersiapkan laporan keuangan untuk manajemen yang mencakup laporan biaya dan laporan arus kas. Administrator keuangan memonitor investasi perusahaan.

- e. Pajak

Tugas *administrator* keuangan dalam sebuah organisasi mempersiapkan pajak bagi organisasi, sesuai dengan ketentuan dan prosedurnya. Tanggungjawab administrasi keuangan seorang administrator keuangan mengawasi operasi keuangan harian dan perencanaan keuangan jangka panjang. Pengembangan proses laporan pedoman yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan koordinasi departemen keuangan kepegawaian. Seorang staff administrasi keuangan yang sukses sangat terorganisir dan profesional berorientasi pada detail dengan analitis, komunikasi dan keterampilan matematika yang kuat. Mereka harus memahami persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan usaha di tingkat lokal, negara bagian dan federal, dan tahu teknik audit untuk membantu memastikan operasi keuangan perusahaan tetap mematuhi peraturan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang termasuk dalam genre penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap peristiwa atau fakta, keadaan yang terjadi selama penelitian, menyajikan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diambil dengan bantuan 10 orang informan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan menguji keandalan informasi meliputi perluasan observasi, peningkatan konsistensi penelitian, penggunaan bahan referensi, diskusi dengan rekan sejawat, mengadakan *member check* (Sugiyono, 2016).

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan merupakan proses terpenting dari seluruh fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi organisasi, pengendalian dan pengawasan lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik. menentukan tujuan sudah baik dengan pembuatan RPJMDes. Perencanaan kegiatan belum baik karena partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum

maksimal menyebabkan masyarakat kurang mengetahui rincian anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan .

2. Pelaksanaan

Tindakan atau pelaksanaan suatu rencana secara hati-hati dan terperinci, biasanya dilakukan setelah rencana tersebut dianggap selesai. Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan cukup baik pada pemerintahan Desa Gunung Batu dan dilakukan oleh masing-masing bidang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna anggaran alokasi dana desa. Program yang telah terealisasi belum baik karena masih ada program yang belum terealisasi yaitu untuk pembangunan Gedung Aula Desa untuk Tahun Anggaran 2023.

3. Pengawasan

Pemantauan adalah proses menetapkan indikator kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan terhadap kinerja yang ditetapkan. Pemantauan memastikan bahwa semua kebijakan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga kami dapat menentukan apakah desain tersebut berjalan efektif. Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran cukup baik dilakukan dari kecamatan yaitu kasi pemberdayaan langsung turun kelapangan apakah sudah terealisasi. Pengawasan terhadap penyusunan anggaran belum baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dan BPD dalam pengawasan penyusunan anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan /proyek belum baik karena pengawasan dari BPD dan masyarakat masih kurang dari dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.

4. Pertanggungjawaban

Merupakan pengetahuan dan tanggung jawab atas setiap aktivitas, produk, keputusan dan kebijakan, termasuk pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan dalam peran atau jabatan. Juga menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan kinerja sesuai peran atau tugasnya.

Penyusunan laporan belum baik karena dalam penyusunan Penyusunan Rancangan anggaran Biaya (RAB) fisik masih bergantung pada konsultan atau pendamping Desa, untuk pelaporan telah dibuat SPJ maupun melalui Aplikasi SISKUEDES.

Penyampaian pelaksanaan program Desa Gunung Batu sudah baik, penyampaian pertanggung jawaban laporan anggaran tahunan itu dilaporkan oleh keuangan kepada dengan mengadakan dengan BPD dan BPD melaporkan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa dan selanjutnya dilaporkan ke kasi pinwas kecamatan.

Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

Adapun faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan alokasi dana Desa Di Desa Gunung Batu antara lain :

- a) Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Anggaran
- b) Dilaksanakannya Penyampaian Pelaksanaan Program.

Faktor-faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gunung Batu

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan diantaranya :

- a) Kurangnya Partisipasi Masyarakat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa
- b) Belum optimalnya peran BPD dalam Pengawasan
- c) Penyusunan RAB masih bergantung pada Pendamping Desa

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan cukup baik, dilihat dari: Pertama, Perencanaan Keuangan, penentuan tujuan sudah baik dengan pembuatan RPJMDes. Perencanaan kegiatan belum baik karena partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum maksimal. Kedua, Pelaksanaan, indikator pelaksanaan kegiatan cukup baik pada pemerintahan Desa Gunung Batu dan dilakukan oleh masing-masing bidang. Program yang telah terealisasi belum baik karena masih ada program yang belum terealisasi. Ketiga, Pengawasan indikator Pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran cukup baik dilakukan dari kecamatan yaitu kasi pemberdayaan, Pengawasan terhadap penyusunan anggaran belum baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dan BPD dalam pengawasan penyusunan anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan /proyek belum baik karena pengawasan dari BPD tidak optimal. Keempat, Pertanggungjawaban Penyusunan laporan belum baik karena dalam penyusunan Penyusunan Rancangan anggaran Biaya (RAB) fisik masih bergantung pada konsultan atau pendamping Desa, Penyampaian pelaksanaan program Desa Gunung Batu sudah baik, penyampaian pertanggung jawaban laporan anggaran tahunan itu dilaporkan oleh Sekdes dengan melaporkan laporan keuangan kepada kepala desa, kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada BPD. Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Gunung Batu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, Pertama, Faktor Pendukung antara: Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Anggaran dan Dilaksanakannya Penyampaian Pelaksanaan Program. Kedua Faktor Penghambat antara lain: Penyusunan RAB masih bergantung pada Pendamping Desa, Kurangnya Partisipasi Masyarakat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, dan Belum optimalnya peran BPD dalam Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Anonim. Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan, Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

A Anwar, M. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* . Jakarta: Kencana

Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Puataka Setia.

Hasanah, N. (2023) 'PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA KATERING SHOPIA DI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH', *INOVATIF*, 5(2), pp. 41–48.

Hasanah, N. and Jamilah, J. (2023) 'PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DI RUMAH MAKAN OLA AMUNTAI', *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 5(1), pp. 31–39.

Khasanah, Afista Nur dan Ichwan Marisan.2022. *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)*. Jurnal Rekognisi Akuntansi Vol. 6, nomor 1, hal. 32-48

Mahendra, Rizal 2023. *Pengelolaan Pasar oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong*. eJournal Administrasi Publik, 2023, 11 (1): 113-125

Purba, Djahotman. 2021. *Analisis Laporan Keuangan untuk Teknik dan ekonomi Pekalongan* : Nasya Expanding managemen



Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.